

**STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI MASA PANDEMI  
COVID-19 DALAM UPAYA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DKI  
JAKARTA**

Nathasya Ratu Amanda

NPP. 29.0605

*Asdaf Provinsi DKI Jakarta  
Program Studi Keuangan Publik*

Email: nathasya71@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** A phenomenon that the world did not expect and Indonesia was hopeless in 2020. This virus certainly has many impacts on all regions in Indonesia, including the DKI Jakarta province, such as on society, on education, work, politics, and also the economy of an area. In DKI Jakarta Province, Regional Original Revenue (PAD) has decreased so that the financing of regional infrastructure development is hampered. The Provincial Government of DKI Jakarta, of course, continues to do its best in making strategies that are expected to increase Regional Original Income (PAD). **Purpose:** This study aims to find out what are the strategies carried out by the DKI Jakarta Provincial Government in increasing Regional Original Income (PAD) in an effort to finance regional development during the Covid-19 pandemic.

**Method:** The author uses a qualitative research design with a descriptive method through an inductive approach, namely a research method that describes problems based on specific facts and then solves general/general problems. This study will describe the strategy undertaken by the Regional Financial Management Agency of DKI Jakarta Province in increasing local revenue (PAD) in an effort to finance regional development. **Result:** The strategy carried out by the DKI Jakarta Provincial Government certainly has an important role in increasing regional income after the economic downturn in the DKI Jakarta province. **Conclusion:** The strategy taken by the DKI Jakarta Provincial Government to increase PAD in an effort to finance regional development is to increase regional income by optimizing the potential of PAD and facilities and infrastructure to improve PAD performance. **BEARING.** The DKI Jakarta Provincial Government is expected to continue to carry out developments in regional development financing and also create strategic breakthroughs that are even better than before, not forgetting to continue to pay attention to trends so that these strategies can adapt to the times so that the strategies made are not in vain.

**Keywords:** Regional Original Income (PAD), Regional Development Financing, Strategy

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Munculnya kasus Covid-19 (Coronavirus disease 2019) merupakan fenomena yang tidak diharapkan dunia dan Indonesia tanpa terkecuali pada tahun 2020. Virus ini tentunya menimbulkan banyak dampak bagi semua daerah di Indonesia termasuk provinsi

DKI Jakarta seperti pada masyarakat, pada pendidikan, pekerjaan, politik, dan juga ekonomi pada suatu daerah. Pada Provinsi DKI Jakarta, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan sehingga pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah menjadi terhambat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentunya terus berusaha semaksimal mungkin dalam membuat strategi-strategi yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja strategi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam upaya pembiayaan pembangunan daerah selama masa pandemi Covid-19. **Metode:** Penulis menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif yaitu metode penelitian yang menggambarkan permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus dan selanjutnya memecahkan permasalahan persoalan yang bersifat umum/general. Pada penelitian ini akan digambarkan strategi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dalam upaya pembiayaan pembangunan daerah. **Hasil/Temuan:** Strategi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tentunya memiliki peranan penting dalam meningkatkan kembali pendapatan daerah setelah terjadinya penurunan terhadap perekonomian pada provinsi DKI Jakarta. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan PAD dalam upaya pembiayaan pembangunan daerah adalah dengan Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan potensi PAD Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang PAD Meningkatkan kualitas SDM pengelola PAD Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam wajib pajak dan Mengaokasikan anggaran dalam peningkatan kinerja pengelola PAD. Dari hasil data yang ada, PAD Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2020 ke 2021 masih mengalami penurunan. Hal tersebut berarti bahwa strategi yang diciptakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang efektif dan efisien.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Pembiayaan Pembangunan Daerah, Strategi

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Di era sekarang ini, pemerintah daerah harus senantiasa melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien agar cita-cita pemerintah daerah yaitu Good Governance yang dimana merupakan konsep yang bertujuan agar dapat mempertanggungjawabkan proses pencapaian keputusan serta pelaksanaannya secara bersama dengan baik. Dalam rangka memenuhi kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu fungsi dari pemerintahan, pengelolaan keuangan yang optimal tentunya dapat membantu hal tersebut dari segi ekonomi rakyat. Pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak, retribusi, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan aspek yang dapat mendorong meningkatnya ekonomi pada suatu daerah.

Munculnya kasus Covid-19 (Coronavirus disease 2019) merupakan fenomena yang tidak diharapkan dunia dan Indonesia tanpa terkecuali pada tahun 2020. Virus dari golongan coronavirus (SARS-CoV-2) merupakan penyebab munculnya penyakit baru. Pemerintah Indonesia termasuk pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta mengambil beberapa kebijakan seperti menutup sekolah, tempat wisata, bahkan tempat ibadah serta menerapkan sistem Work From Home (WFH), membatasi jam operasional transportasi umum dan semua transaksi yang berlangsung menggunakan transaksi non tunai. Hal tersebut dilakukan dengan harapan dapat mengurangi potensi penyebaran dan perlahan dapat

memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Virus ini tentunya menimbulkan banyak dampak bagi semua daerah di Indonesia termasuk provinsi DKI Jakarta seperti pada masyarakat, pada pendidikan, pekerjaan, politik, dan juga ekonomi pada suatu daerah. Hal tersebut disebabkan oleh pemberlakuan pembatasan pada berbagai sektor sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia yang tentunya akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Latar belakang permasalahan penelitian yang saya lakukan adalah Pemerintah provinsi DKI Jakarta harus menciptakan strategi yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) agar pembangunan daerah yang dilaksanakan tetap berjalan dengan baik dan tidak malah menimbulkan masalah baru yang menyebabkan pemerintah harus memangkas lagi anggaran yang ada. Strategi pada dasarnya merupakan suatu cara mengidentifikasi dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Selain itu, strategi juga dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan. Andrews (1971) pada bukunya yang berjudul *The Concept of Corporate Strategy*, meneliti desain strategi sebuah organisasi adalah dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan internal organisasi, peluang lingkungan organisasi, serta ancaman yang ada. Pada tahun 2020, pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta paling besar berasal dari anggaran pajak daerah sebesar Rp 32,48 Triliun yang dimana paling dominan berasal dari pajak restoran yaitu sebesar Rp 1,850 Triliun. Namun, dikarenakan adanya virus Covid-19 maka banyak restoran yang terpaksa memberlakukan pembatasan karena adanya PPKM sehingga pengunjung restoran pun ikut berkurang. Tidak hanya itu, bahkan beberapa restoran terpaksa ditutup dikarenakan mengalami kerugian. Oleh karena itu, penentuan strategi yang tepat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta harus dirancang dengan sedemikian rupa agar strategi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Kajian tentang pemberdayaan fakir miskin telah dilakukan oleh 3 peneliti yang dimana penelitian yang dilakukan Tito Inneka Widyawati, 2017 “STRATEGI PEMERINTAH KOTA TANGERANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DARI SEKTOR PAJAK PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN (BPKD) KOTA TANGERANG”, penelitian yang dilakukan Mukhtar Hakim R, Ma'mun Sarma, Harianto, 2018 “STRATEGI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS”, dan penelitian yang dilakukan Nursafitra M, Muh. Nursadik, Muhammad Yunus, 2019 “STRATEGI PENINGKATAN PAD MELALUI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN ENREKANG” yang dimana dari 3 penelitian terdahulu ini terdapat persamaan pada tujuan penelitian yaitu menganalisis strategi pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif. perbedaannya terdapat pada lokus penelitian dan penelitian terdahulu menggunakan sistem intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mengukur strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan, penelitian ini menggunakan analisis rasio.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian yang digunakan sebelumnya untuk mendapatkan bahan ataupun materi perbandingan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian penulis sekarang. Berikut dalam kajian pustaka meletakkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya :

1. Hasil penelitian Andri Apriyadi, Tito Inneka Widyawati, 2017 “STRATEGI PEMERINTAH KOTA TANGERANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DARI SEKTOR PAJAK PADA BADALN PENGELOLAAN KEUANGAN (BPKD) KOTA TANGERANG” Pada penilitan ini, peneliti menyimpulkan bahwa strategi pemda kota Tangerang dalam meningkatkan PAD dilakukan oleh BPKD melalui aspek kelembagaan serta pelaksanaan pengelolaan PAD telah berjalan dengan baik.
2. Hasil penelitian yang dilakukan Mukhtar Hakim R, Ma'mun Sarma, Harianto, 2018 “STRATEGI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS” Pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa kemandirian pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap pemerintah pusat termasuk ke dalam kategori sangat rendah dan pemerintah daerah harus melakukan peningkatan pengelolaan pendapatan daerahnya dengan optimalisasi potensi
3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nursafitra M, Muh. Nursadik, Muhammad Yunus, 2019 “:STRATEGI PENINGKATAN PAD MELALUI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN ENREKANG” Dalam kesimpulan penelitian ini masih terdapat kekuatan dan juga kelemahan dalam strategi yang digunakan oleh pemerintah. Bapenda pada Kabupaten Enrekang memiliki pegawai honorer dengan keahlian yang telah disesuaikan dalam berbagai bidang kerja. Tetapi, masih terdapat kekurangan jumlah pegawai negeri sipil dan tenaga ahli dalam pengoperasian sistem aplikasi dan teknologi yang ada.

#### **1.5. Tujuan.**

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis merumuskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam upaya pembiayaan pembangunan daerah untuk penanganan virus Covid-19;
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan strategi pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam upaya pembiayaan pembangunan daerah untuk penanganan virus Covid-19; dan
3. Untuk mengetahui apakah strategi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam upaya pembiayaan pembangunan daerah untuk penanganan virus Covid-19 sudah berjalan secara efektif dan efisien.

## **II. METODE**

Bapak dosen sekalian untuk menjawab rumusan masalah saya menggunakan teori Strategi dari Mintzberg dalam Hastutik et al. 2021;4 mengatakan bahwa dalam teori ini terdapat 4 dimensi, yaitu Dimensi Perencanaan, Tindakan, Keputusan, dan Perspektif. Tinjauan teoritis ini ditopang oleh

tinjauan legalistik yang dimana tinjauan legalistik merupakan payung hukum yang mengatur tema penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis komprehensif. Yaitu kajian terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022

Sebagai gambaran langkah teknis apa saja yang saya gunakan peneliti dilapangan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditopang dengan alat analisis teori parsons at.al maka saya menetapkan desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif. kualitatif deskriptif adalah suatu metode dimana peneliti langsung menanyakan langsung kepada narasumber yang terlibat. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji topik penelitian tertentu dan bersifat khusus kemudian diperoleh pengetahuan yang lebih luas. Sehingga pengetahuan itu dapat berlaku pada lokus yang lebih besar.

Setelah desain penelitian ditetapkan maka saya akan mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Setelah data dikumpulkan maka akan dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahapan utama nalisis kualitatif dari 3 tahapan. Yaitu data reduction, data display, conclusion drawing verification. Data reduksi adalah memilih dan memilah data sesuai dengan dimensi teori pemberdayaan parsons at al, data display kegiatan menyajikan data yang telah direduksi kedalam gambar, tabel, dan lain-lain yang mudah dimengerti, yang terakhir conclusion drawing yaitu membuat kesimpulan sementara dari data yang sudah disajikan kemudian diverifikasi kepada narasumber kemudian diperoleh kesimpulan akhir.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemprov DKI Jakarta Dalam Upaya Pembiayaan Pembangunan Daerah**

Hasil Observasi Peneliti dilapangan Peneliti melihat, Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan. Strategi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tentunya memiliki peranan penting dalam meningkatkan kembali pendapatan daerah setelah terjadinya penurunan terhadap perekonomian pada provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cerminan suatu daerah, seberapa besar PAD yang diperoleh oleh pemerintah daerah dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah yang ditujukan untuk membiayai pembangunan pemerintah daerah dalam rangka mensejahterahkan masyarakatnya.

Hal tersebut sejalan dengan arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Jokowi, bahwa prioritas dari pembangunan nasional harus sesuai dengan potensi dan juga kondisi masing-masing daerah secara riil di lapangan. Fokus pembangunan tersebut diarahkan kepada industry, pariwisata, ketahanan pangan, usaha mikro kecil menengah, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan, serta reformasi kesehatan dengan sasaran dan target yang harus dicapai dalam rangka penanganan virus Covid-19 yang saat ini masih terjadi di Indonesia. Pembiayaan Daerah merupakan

setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh pemerintah daerah, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi.

=> Perencanaan

### 1. Dasar Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Manusia pada dasarnya hidup dengan mempunyai keinginan akan pencapaian tujuan yang dikehendaki oleh masing-masing individu. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua keinginan yang telah direncanakan oleh seorang individu tersebut tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan dasar hukum yang ada. Dasar hukum tentunya menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam pengambilan sebuah keputusan dikarenakan dasar hukum merupakan pondasi yang digunakan sebagai arah serta acuan dalam mencapai tujuan sebuah perencanaan. Terbitnya dasar hukum itu sendiri tentunya dapat dipengaruhi oleh konstitusi, tertulis maupun tidak tertulis. Dasar hukum tersebut membentuk politik, ekonomi, sejarah, dan masyarakat dalam berbagai cara. Selain itu, dasar hukum yang ada memiliki berbagai fungsi seperti sebagai sarana pengendali sosial sebuah sistem, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat, dan sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.

Dalam menciptakan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BKPD) Provinsi DKI Jakarta menjadikan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar hukum. Peraturan Pemerintah (PP) tersebut mencakup keseluruhan dari kegiatan pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Unsur-unsur tersebut tentunya dijadikan sebagai dasar yang kuat serta sebagai bahan pertimbangan terhadap strategi yang akan diciptakan kedepannya.

### 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Rangka Peningkatan PAD

Kesuksesan sebuah organisasi tentunya ditentukan oleh seberapa berkompeten Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya dan hal tersebut menjadikan SDM sebagai salah satu faktor utama yang tidak akan bisa terlepas dari sebuah organisasi. SDM juga merupakan motor penggerak sebuah organisasi yang dapat membawa organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam praktiknya dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit SDM yang masih belum bisa memenuhi kriteria yang diinginkan oleh sebuah organisasi. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan terhadap kualitas SDM dalam organisasi tersebut dengan tujuan dapat memenuhi kriteria yang ada dan juga menciptakan SDM yang lebih berkompeten.

Dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bukanlah hal yang mudah tetapi bukan juga hal yang tidak dapat dilakukan. Hal tersebut dikarenakan dalam peningkatan kualitas SDM mengandung hal-hal yang berhubungan dengan pembentukan karakter individu. Pembentukan karakter tersebut mencakup peningkatan keterampilan, loyalitas, hingga kemampuan individu dalam melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pelatihan (training), pendidikan, pembinaan, dan rekrutmen dengan cara menyesuaikan klasifikasi dengan kebutuhan organisasi.

### 3. Pengoptimalan Teknologi yang Ada

Perkembangan teknologi pada masa digitalisasi sekarang ini sudah berkembang sangat pesat sehingga tidak dapat kita pungkiri bahwa teknologi tentunya merupakan salah satu unsur yang

sangat penting dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Teknologi tersebut tentunya memberikan dampak positif yaitu berjalannya sebuah kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien. Optimalisasi dalam penggunaan teknologi yang ada tentunya akan menjadi unsur yang tepat dalam upaya pemulihan ekonomi global di masa pandemi Covid-19.

=> Tindakan

#### 1. Membangun Sarana dan Prasarana

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam rangka mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana merupakan alat tidak langsung yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta tentunya haurs menentukan tindakan dalam memilih sarana dan prasarana yang digunakan selama merencanakan hingga menerapkan strategi dalam peningkatan Pendapatan asli Daerah (PAD). Hal tersebut dikarenakan penentuan tersebut memberikan pengaruh yang sangat luas terhadap keberlangsungan strategi tersebut. Jika sarana dan prasarana nya tidak memenuhi kriteria dan tidak memiliki kualitas yang diinginkan, maka berjalannya kegiatan akan terhambat.

#### 2. Pemanfaatan Aplikasi Dengan Teknologi Yang Ada

Seperti yang sudah penulis bahas pada dimensi sebelumnya, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta sudah memanfaatkan aplikasi yang telah berlaku yaitu sistem Smart Planning Budgeting (SPB). Sistem tersebut tentunya sangat membantu kinerja pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta dikarenakan mempercepat dan juga memberikan hasil yang lebih transparan bagi masyarakat luas.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta telah memastikan para perangkatnya untuk meningkatkan persentase penggunaan sistem tersebut agar kedepannya lebih terbiasa dan tidak tertinggal tren yang sedang berkembenag di masyarakat luas.

=> Keputusan

#### 1. Peningkatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta

#### 2. Perbaikan Infrastruktur dalam Rangka Pembangunan Daerah

Tahap pertama sebelum melaksanakan perbaikan infrastruktur dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memperkuat pertahanan ekonomi agar pertumbuhan lebih berkualitas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dengan mengutamakan peningkatan Energi baru Terbarukan (EBT). Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pengembangan wilayah dengan tujuan mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan mengembangkan sektor unggulan pada Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor. Selain itu, dilaksanakannya pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan, perijinan, penguatan kelembagaan serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memperkuat infrastruktur dalam rangka pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan menyediakan akses perumahan dan pemukiman layak, aman dan terjangkau. Dalam konteks pandemi Covid-19, Pemprov DKI Jakarta juga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan agar pencegahan maupun penanganan virus Covid-

19 yang masih terjadi sekarang ini dapat ditangani dengan lebih baik lagi.

### **3.2 Faktor Penghambat Capaian Strategi Pemprov DKI Jakarta dalam Meningkatkan PAD**

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di provinsi DKI Jakarta mengalami beberapa hambatan yakni Aspek sumber daya manusia, Aspek kesadaran wajib pajak dan Aspek Penegakan Hukum. Kurangnya SDM yang baik mempunyai peranan penting, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan atau aturan-aturan serta akuratnya komunikasi yang disampaikan, bila sumber daya tidak tersedia maka suatu kebijakan akan mengalami kegagalan. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena kurangnya informasi dan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak dan sekaligus manfaat yang akan dirasakan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dengan pembayaran pajak tersebut. Kurangnya penegakan hukum terhadap wajib pajak, misalnya sering terjadinya keterlambatan dalam membayar pajak bagi wajib pajak yang menyebabkan permasalahan bagi petugas administrasi dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

### **3.3 Efektivitas dan Efisiensi Strategi Pemprov DKI Jakarta Meningkatkan PAD Dalam Upaya Pembiayaan Pembangunan Daerah Untuk Penanganan Virus Covid-19**

#### **1) Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Daerah Dengan Mengoptimalkan Potensi PAD**

Kegiatan ini dilakukan dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah serta mengoptimalkan penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta.

#### **2) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang PAD**

Sarana dan prasarana penunjang PAD dapat ditingkatkan dengan melakukan pemeliharaan terhadap sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini BPKD Provinsi DKI Jakarta menggunakan sistem Smart Planning Budgeting (SPB).

#### **3) Meningkatkan Kualitas SDM Pengelola PAD**

Strategi ini dapat dilakukan dengan melaksanakan pelatihan yang berisikan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah. Pada pelatihan tersebut akan diberikan teori maupun praktik agar SDM pengelola PAD dapat terus mengasah keterampilan yang dimiliki agar kedepannya semakin berkompeten.

#### **4) Mengembangkan Partisipasi Masyarakat dalam Wajib Pajak**

Dalam hal ini, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk ikut serta menggerakkan kegiatan wajib pajak agar masyarakat senantiasa melaksanakan perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah menggerakkan masyarakat yang awalnya acuh terhadap pembayaran pajak menjadi lebih peduli dan aktif dalam pelaksanaan wajib pajak.

## 5) Mengalokasikan Anggaran dalam Peningkatan Kinerja Pengelola PAD

Pengalokasian serta peningkatan kinerja pengelola PAD dengan meminimalisir perpindahan/mutasi aparatur pengelola PAD. Hal tersebut dilakukan dengan tetap melaksanakan koordinasi antar pimpinan SKPD dalam merotasi dan mutasi setiap aparatur pengelola PAD.

### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, metode deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan oleh penulis sendiri sama dengan yang digunakan terdahulu. Salah satu hasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa kemandirian pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap pemerintah pusat termasuk ke dalam kategori sangat rendah dan pemerintah daerah harus melakukan peningkatan pengelolaan pendapatan daerahnya dengan optimalisasi potensi

### 3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Persamaan pada tujuan penelitian yaitu menganalisis strategi pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif. perbedaannya terdapat pada lokus penelitian dan penelitian terdahulu menggunakan sistem intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mengukur strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan, penelitian ini menggunakan analisis rasio.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah terus berupaya semaksimal mungkin untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta. Terlebih lagi, pemerintah daerah harus terus melakukan pembaharuan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di Provinsi DKI Jakarta dengan pembiayaan pembangunan daerah yang dapat terlaksana dengan adanya pendapatan asli daerah (PAD). Pembiayaan pembangunan daerah yang dilaksanakan salah satunya adalah pada bidang kesehatan. Pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, pemerintah daerah harus terus mengoptimalkan kinerjanya dengan menciptakan strategi-strategi agar pencegahan virus Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta dapat terlaksana secara efektif dan juga efisien.
2. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan PAD dalam upaya pembiayaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan potensi PAD;
  - b. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang PAD;
  - c. Meningkatkan kualitas SDM pengelola PAD;
  - d. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam wajib pajak; dan

- e. Mengalokasikan anggaran dalam peningkatan kinerja pengelola PAD.
3. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan PAD dalam upaya pembiayaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:
  - a. Sumber daya manusia yang kurang berkompeten dapat mempengaruhi konsistensi ketentuan atau aturan-aturan serta akuratnya komunikasi yang disampaikan, bila sumber daya tidak tersedia maka suatu kebijakan akan mengalami kegagalan;
  - b. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena kurangnya informasi dan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak dan sekaligus manfaat yang akan dirasakan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dengan pembayaran pajak tersebut; dan
  - c. Kurangnya penegak hukum terhadap wajib pajak yang menimbulkan keterlambatan dalam membayarkan pajak bagi wajib pajak.
4. Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diciptakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai masih kurang efektif dan efisien. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis selama penelitian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta masih belum meningkat setelah dilakukannya strategi-strategi yang ada.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan lebih memperhatikan meningkatkan melaksanakan kegiatan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat sebaiknya mengenalkan terlebih dahulu kepada masyarakat terkait strategi pemberdayaan.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Creswell. 2018. *Research Design*, USA: SAGE-----, 2018. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among*

*Five Approaches*, USA: SAGE -----, 2019. *Educational Research: Planning, Conducting, and*

*Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, USA: Merrill Education

Darmadi, Hamid. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Sosial*, Bandung: Alfabeta

Firdausy, C. M., 2018. *Kebijakan & Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Hastutik, S. et al., 2021. *Strategi Akuntansi Manajemen*, Sukoharjo: Tahta Media Group

Hadi, I.P., 2020. *PENELITIAN MEDIA KUALITATIF (Filosofi Penelitian, Paradigma, Rentang Teori, Langkah-langkah Penelitian Media: Metode Reception Studies, Etnografi Media/Netnografi,*

*Fenomenologi, Studi Kasus, Analisis Tematik)*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Hery. 2018. *Manajemen Strategik*, Jakarta: PT Gramedia

Maxwell, J. A., 2013. *Qualitative Research Design*, USA: SAGE Publications

Nazir. 2014, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo

Noor, J., 2017. *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, Jakarta: KENCANA

## **B. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.

## **C. JURNAL**

Sahin, S., dan Jayanta Mete. 2021. "A Brief Study on Descriptive Research: Its nature and Application in Social Science", International Journal of Research and Analysis in Humanities Vol. 1, India: IJRAH

Aspers, P. dan Ugo Corte. 2019. "What is Qualitative in Qualitative Research", Sweden: Departement of Sociologi, Uppsala University

Hakim, M. et al. 2018. "Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas", Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Volume 10

Priyatna, C. et al. 2020. "Optimalisasi Teknologi Informasi Oleh Lembaga

*pemerintah Dalam Aktivitas Komunikasi Publik*", Jurnal Kajian Kpmunikasi Volume 8

## **D. INTERNET**

<https://apbd.jakarta.go.id>. APBD Provinsi DKI Jakarta. Jumat, 27 Agustus 2021

<https://www.impactio.com>. A Definition of Research Instruments and Their Purpose in Obtaining Data From Research Subjects. Senin, 30 Agustus 2021

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/mendorong-kemandirian-daerah-melalui-optimalisasi-pendapatan-asli-daerah>. *Mendorong Kemandirian Daerah Melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah*. Senin, 14 Maret 2022

<https://bppkad.grobogan.go.id/info/berita/15-pendapatan-asli-daerah-sebagai-cerminan-ekonomi-daerah>. *Pendapatan Asli Daerah Sebagai Cerminan Ekonomi Daerah*. Rabu, 16 Maret 2022

<https://ppid.jakarta.go.id/show/asset/LKPD2020>. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta*. Rabu, 16 Maret 2022

<https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-hukum>. *Hukum: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Unsur dan Jenis*. Jumat, 18 Maret 2022

<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-perencanaan.html>. *Pengertian Perencanaan; Fungsi, Tujuan, dan Jenis-Jenis Perencanaan*. Senin, 21 Maret 2022

<https://www.itworks.id/35861/optimalisasi-pemanfaatan-teknologi-digital-dorong-percepatan-pemulihan-ekonomi.html>. *Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi*. Senin, 21 Maret 2022

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/24/142001469/sarana-dan-prasarana-definisi-fungsi-ruang-lingkup-serta-contohnya?page=all>. *Sarana dan Prasarana: Defisini, Fungsi, Ruang Lingkup, serta Contohnya*. Kamis, 24 Maret 2022

<https://www.tembalang.semarangkota.go.id>. *Sarana dan Prasarana*. Jumat, 25 Maret 2022

